

KATA PENGANTAR

Pembangunan membutuhkan perencanaan yang baik. Perencanaan yang terarah dan sistematis diperlukan agar tujuan dari kegiatan pembangunan itu dapat tercapai. Untuk itu diperlukan road map pembangunan yang disesuaikan dengan keinginan dan visi misi pembangunan daerah tersebut. Potensi dan kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki adalah dasar dalam menentukan kemana dan apa yang ingin dicapai baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Disamping itu kebijakan pembangunan selayaknya harus fokus dan sesuai dengan dasar pembangunan dan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu provinsi kepulauan di Indonesia sangat concern dan menaruh perhatian yang besar dalam mencapai target-target pembangunan yang telah diprogramkan. Salah satunya adalah pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan. Dengan luas wilayah yang sebagian besar adalah pulau-pulau kecil dan kepulauan, Maluku Utara mengandung kekayaan sumberdaya alam yang luar biasa besarnya terutama di sektor perikanan dan kelautan, kehutanan, perkebunan dan pertambangan.

Laporan Masterplan Perindustrian dan Perdagangan yang disusun ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan pembangunan di sektor industri dan perdagangan oleh para pemangku kepentingan daerah.

Dengan segala kerendahan hati dan rasa ucap syukur yang banyak laporan Masterplan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara dapat diselesaikan dengan baik. Semoga dapat bermanfaat bagi proses pembangunan di Provinsi Maluku Utara ke depan. Amin.

Ternate, Agustus 2013

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BABI. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Maksud dan tujuan	6
D. Output	6
E. Outcomes	7
F. Sistematika penulisan laporan akhir	7
BAB II. TINJAUAN TEORI.....	9
A. Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilaya	9
B. TeoriBasis Ekonomi	9
C. Analisis Potensi Relatif Perekonomian Wilayah	12
D. Daya Saing Wilayah	13
E. Pembangunan Daerah 20	
F. Pendekatan Pengembangan Masyarakat.....	22
G. Pembangunan Partisipatif 23	
H. Pendekatan Pembukaan Daerah Baru dan Migrasi Penduduk.....	25

I. Pendekatan Pembangunan Pertanian	25
J. Industrialisasi Pedesaan	26
K. Pembangunan Desa Terpadu	26
L. Pengembangan Ekonomi Pedesaan dan Pembangunan Wilayah.....	27
M. Pendekatan Pembangunan Ekonomi Lokal	28
BAB III. METODE STUDI.....	32
A. Ruang Lingkup Pekerjaan	32
B. Data Yang Dibutuhkan	34
C. Metode Analisis Data	35
BAB IV. KONDISI WILAYAH DAN PEREKONOMIAN	
PROVINSI MALUKU UTARA.....	40
A. Profil wilayah maluku utara	40
B. Sumber daya alam	43
C. Rencana pengembangan sistem transportasi.....	52
D. Arah pengembangan jaringan transportasi	66
E. Rencana pengembangan jaringan listrik.....	68
F. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi	71
G. Rencana pengembangan sumberdaya air.....	73
BAB V. ANALISIS DATA DASAR RANCANGAN MASTER PLAN	
PENGEMBANGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	79
A. Penetapan Ekonomi Basis Industri Dan Perdagangan.....	79
B. Penentuan Sektor Unggulan Dengan Metode Tabel Input Output	82
C. Penentuan sektor Basis Dengan Metode Location Quotient	85
D. Pola Pengembangan Sektor Pendukung Perindustrian Dan Perdagangan.....	93

E. Analisis Pengembangan Perdagangan	97
F. Dan Kerjasama Ekonomi Regional	98
BAB VI. RANCANGAN MASTER PLAN	
PENGEMBANGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	116
6.1. Sektor Unggulan.....	119
6.2. Sektor Pendukung	119
6.3. Prioritas Pengembangan	120
6.4. Sektor Pengembangan	123
6.5. Visi, Misi, Kebijakan Dan Strategi	125
6.6. Program Dan Rencana Kegiatan 2014-2018	126
6.7. Perumusan Tujuan.....	131
6.8. Perumusan Sasaran.....	133
DAFTAR PUSTAKA	136
LAMPIRAN	138

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Persentase Per Sektor dalam PDRB Provinsi Maluku Utara Tahun 2005 – 2011	5
Tabel 3.1.	MATRIKS SWOT	39
Tabel 4.1.	Data Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara	40
Tabel 4.2.	Luas Pemamfaatan Lahan Di Provinsi Maluku Utara (ha)	47
Tabel 4.3.	Ekosistem Pesisir dan Lautan Wilayah Pesisir	48
Tabel 4.4.	Jenis Sumber Daya Ikan, Potensi serta Estimasinya	49
Tabel 4.5.	Rencana Jaringan Jalan Trans Maluku Utara	57
Tabel 4.6.	Rencana Terminal Penumpang di Maluku Utara	61
Tabel 5.1.	Produk Domestik Regional Bruto Berdasarkan Harga Berlaku Menurut Sumber Industri Provinsi Maluku Utara, 2009-2012 (Dalam Jutaan Rupiah)	80
Tabel 5.2.	Penentuan Sektor Unggulan dengan Berbagai Kriteria di Provinsi Maluku Utara, 2012	83
Tabel 5.3.	LQ Provinsi Maluku Utara	86
Tabel 5.4.	LQ Kota Ternate Provinsi Maluku Utara	86
Tabel 5.5.	LQ Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara.....	87
Tabel 5.6.	LQ Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara.....	88
Tabel 5.7.	LQ Kabupaten Halmahera BaratProvinsi Maluku Utara	88
Tabel 5.8.	LQ Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara.....	89
Tabel 5.9.	LQ Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara.....	89
Tabel 5.10.	LQ Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara	90
Tabel 5.11.	LQ Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara	91

Tabel 5.12.	LQ Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara	92
Tabel 5.13.	Volume dan Nilai Ekspor Dirinci Menurut Negara Tujuan di Provinsi Maluku Utara, 2010-2011	98
Tabel 5.14.	Komoditas Ekspor Maluku Utara Tahun 2011 Menurut Negara Tujuan	99
Tabel 5.15.	Volume dan Nilai Impor Dirinci Menurut Negara Asal di Provinsi Maluku Utara, 2010-2011	100
Tabel. 6.1.	Paket Rencana Program	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Persentase PDRB Provinsi Maluku Utara 2000-2011	3
Gambar 1.2. Persentase Pertumbuhan PDRB Menurut Harga Konstan Tahun 2000 Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2011 (%)	3
Gambar 1.3. Sistematika Penulisan Penyusunan Masterplan Pengembangan Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara	33
Gambar 4.1. Peta Administrasi Provinsi Maluku Utara	42
Gambar 4.2. Peta Penggunaan Lahan Provinsi Maluku Utara	46
Gambar 4.3. Peta Sebaran Potensi Perikanan Provinsi Maluku Utara	51
Gambar 4.4. Peta Rencana Pengembangan Sistem Transportasi di Provinsi Maluku Utara	74
Gambar 4.5. Peta Rencana Jaringan Jalan di Provinsi Maluku Utara	75
Gambar 4.6. Peta Jaringan Pelayaran Laut di Provinsi Maluku Utara	76
Gambar 4.7. Peta Rencana Tatanan Pelabuhan di Provinsi Maluku Utara	77
Gambar 4.8. Peta Sistem Transportasi Udara di Provinsi Maluku Utara	78
Gambar 5.1. Peta Pola Pengembangan Industri Pertanian Prov. Maluku Utara	95
Gambar 5.2. Peta Pengembangan Pertambangan & Penggalian Provinsi Maluku Utara	96
Gambar 5.3. Peta Pengembangan Perdagangan & jasa Provinsi Maluku Utara	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku Utara tergolong relatif tertinggal dengan daerah lain di Indonesia. Salah satu penyebab utama dari ketertinggalan tersebut diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang selalu bertumpu pada dimensi sektoral. Ini tampak jelas dengan dominannya penerapan asas dekosentrasi dan orientasi sektoral pemerintah pusat. Penerapan di daerah pun nampaknya tidak jauh berbeda, terlihat dari kuatnya fanatisme dinas dan pendekatan sektoral dalam RPJMD. Hal ini tercermin dari dokumen-dokumen perencanaan yang tidak mempunyai perincian program dan aksi hingga kecamatan, apalagi kelurahan (Kuncoro, 2012).

Ketertinggalan pembangunan jelas akan menimbulkan permasalahan dan dampak yang lebih besar terhadap pengentasan jumlah kemiskinan, pengangguran, penyediaan lapangan kerja, serta dapat menghambat upaya pengurangan tingkat ketimpangan pendapatan secara regional dalam suatu daerah. Karena itu, perlu dilakukan suatu strategi percepatan pembangunan bagi daerah-daerah tertinggal.

Berbagai permasalahan tersebut akan menjadi ancaman jika tidak segera di selesaikan dengan cepat. Suatu hal yang sangat ironis, mengingat potensi sumberdaya alam yang terkandung di daerah ini sangat besar untuk diolah menjadi sumber pendapatan dan penerimaan daerah dan selanjutnya dapat digunakan dalam kegiatan pembangunan yang berorientasi pada terwujudnya pembangunan yang *pro growth*, *pro poor* dan *pro equity*. Hal tersebut dapat dicapai jika strategi pembangunan di implementasikan dengan baik tanpa meninggalkan prinsip-prinsip

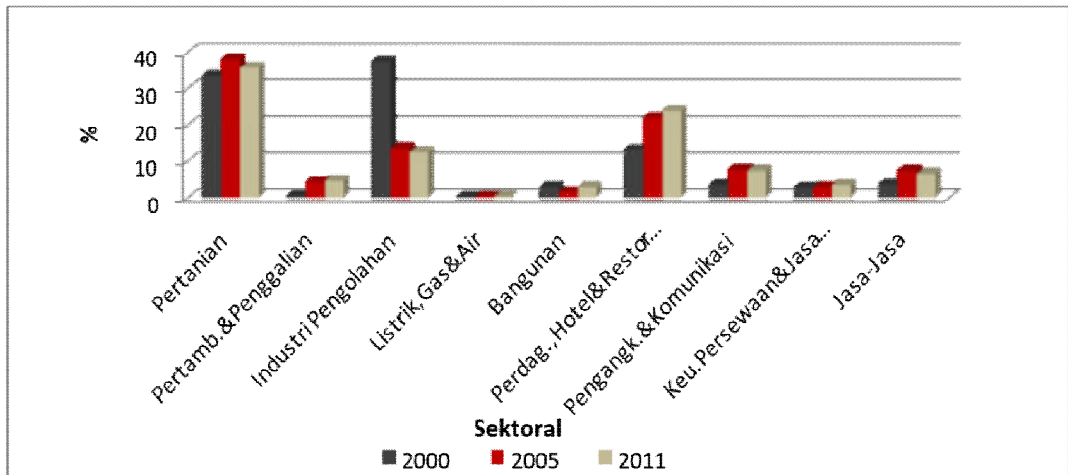
pembangunan secara global (*millenium goal development*) yang tertuang dalam dasar dan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan.

Sejak menjadi provinsi, pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara menunjukkan trend peningkatan yang cukup baik (gambar 2) . Hal ini tak lepas dari peran sektor-sektor ekonomi yang juga mengalami peningkatan. Secara sektoral PDRB Provinsi Maluku Utara disumbang oleh tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian, perdagangan-hotel-restoran dan sektor industry pengolahan (gambar 1).

Sektor pertanian mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan masih merupakan sektor penyumbang terbesar PDRB provinsi Maluku Utara. Hal ini tercermin dari mata pencaharian masyarakat Maluku Utara sangat mengandalkan hasil-hasil pertanian seperti cengkeh dan pala. Selain itu, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB masih menjadi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, yaitu sekitar 33,71%-36,03% pada tahun 2000-2011. Dengan kata lain, sektor pertanian merupakan sektor unggulan Provinsi Maluku Utara.

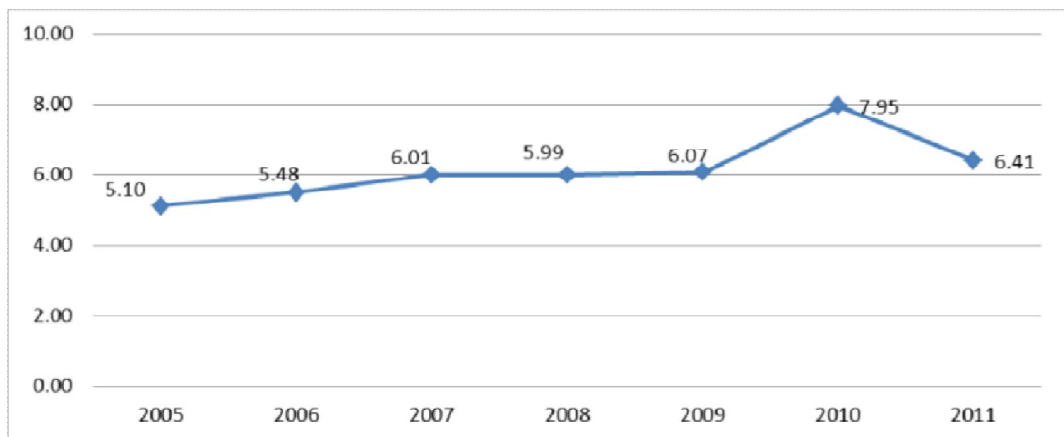
Karena merupakan sektor unggulan, maka selayaknya arah dan kebijakan pengembangan industri dan perdagangan difokuskan pada sektor ini. Hal ini sesuai dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesai (MP3I) dimana posisi Maluku Utara berada dalam koridor VI yang menitikberatkan pada pengembangan komoditas perikanan dan pertambangan nikel.

Untuk mendukung pengembangan sektor industri dan perdagangan dibutuhkan beberapa persyaratan mendasar seperti pelayanan sistem perijinan yang mudah, iklim dunia usaha yang sehat, keamanan dan kenyamanan dalam melakukan usaha, serta tentunya yang paling penting adalah dukungan infrastruktur berupa sarana dan prasarana ekonomi seperti jalan, listrik, pelabuhan, bandara, transportasi darat, udara maupun laut, pasar, serta fasilitas pendukung lainnya.



Sumber : diolah dari BPS Malut

Gambar 1.1. Persentase PDRB Provinsi Maluku Utara 2000-2011



Sumber : diolah dari BPS Malut

Gambar 1.2. Persentase Pertumbuhan PDRB Menurut Harga Konstan Tahun 2000 Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2011 (%)

Industri pengolahan yang terdapat di Provinsi Maluku Utara juga merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam peningkatan PDRB

setelah pertanian dan perdagangan. Sektor industri mampu menyumbang PDRB Provinsi Maluku Utara sebesar 13,75% pada tahun 2005 dan 12,73% pada tahun 2011. Walaupun tergolong masih kecil, namun sektor industri diharapkan dapat berkembang dengan baik. Tahun 2011 provinsi Maluku Utara memiliki 2.070 perusahaan industri dengan jumlah tenaga kerja produktif yang terserap sebanyak 7.965 orang, jumlah investasi sebesar Rp 90.165.644.000, dan menghasilkan produksi sebesar Rp 404.807.059.000,-(BPS Malut,2012).

Demikian pula halnya dengan sektor perdagangan, nilai ekspor Maluku Utara naik pada tahun 2011 sebesar US\$ 608.222.750 dari sebelumnya sebesar US\$ 293.538.578, dengan negara tujuan ekspor sebagian besar ditujukan ke negara Cina dan Jepang. Demikian pula pada sisi impor, nilai impor Maluku Utara pada tahun 2011 juga mengalami kenaikan signifikan US\$ 17.250.565 pada tahun 2010 menjadi US\$ 45.979.847 (BPS, Malut 2012). Peningkatan ini terlihat pula dari sumbangan sektor ini terhadap PDRB provinsi Maluku Utara yaitu sebesar 22,31% pada tahun 2005 naik menjadi 24,20% pada tahun 2011.

**Tabel 1.1. Persentase Per Sektor dalam PDRB
Provinsi Maluku Utara Tahun 2005 – 2011**

Sektor	2005	2011
Pertanian	38.22	36.03
Pertambangan & Penggalian	4.58	4.99
Industri Pengolahan	13.75	12.73
Listrik,Gas & Air Bersih	0.66	0.57
Bangunan	1.93	3.15
Perdag.,Hotel&Restoran	22.31	24.20
Pengangkutan & Komunikasi	7.83	7.65
Keu.Persewaan&Jasa Perusahaan	3.18	3.84

Jasa-Jasa	7.55	6.85
Jumlah	100.0	100.0

Sumber : Diolah dari BPS Malut

Dengan melihat pentingnya sektor industri dan perdagangan bagi provinsi Maluku Utara dalam berbagai hal dan masih banyaknya masalah terkait pembangunan industri di provinsi ini, maka perlu disusun suatu Masterplan sebagai langkah strategi bertahap yang mampu mengembangkan dunia industri dan perdagangan agar mampu menyokong dan meningkatkan pertumbuhan PDRB serta menyerap tenaga kerja.

B. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan sektor industri dan perdagangan adalah :

1. Permasalahan dalam mengidentifikasi potensi ekonomi yang dimiliki oleh setiap kabupaten di Provinsi Maluku Utara.
2. Bagaimana menentukan lokasi industri berdasarkan kluster serta nilai tambah ekonomi bagi pembangunan daerah.
3. Bagaimana strategi pengembangan industri dan perdagangan Provinsi Maluku Utara.

C. Maksud Dan Tujuan

Tujuan dari penyusunan Masterplan pengembangan Industri dan perdagangan Provinsi Maluku Utara adalah :

1. Menganalisis sektor dan komoditas provinsi Maluku Utara yang meliputi peranan sektor industri dan sektor perdagangan terhadap PDRB.

2. Menganalisis perkembangan lokasi kluster industri yang terdiri dari jenis usaha, penyerapan tenaga kerja, dan nilai tambah.
3. Menyusun konsep perencanaan industri dan perdagangan, sinkronisasi kebijakan pembangunan dan pokok-pokok kebijakan industri prioritas.
4. Menyusun strategi pengembangan industri dan perdagangan provinsi Maluku Utara.

D. Output

Output yang diharapkan dari penyusunan Masterplan ini adalah :

1. Informasi tentang masalah dan prospek pengembangan perindustrian dan perdagangan Provinsi Maluku Utara.
2. Sebuah konsep jangka panjang berupa strategi arah kebijakan pembangunan industri dan perdagangan dalam beberapa tahun kedepan sehingga jenis dan kegiatan dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan arah yang direncanakan

E. Outcomes

Outcomes yang diharapkan dari penyusunan Masterplan ini adalah agar investasi di sektor industri dan perdagangan di Provinsi Maluku Utara dapat meningkat sehingga akan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, menyerap jumlah tenaga kerja yang banyak, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Maluku Utara.

F. Sistematika Penulisan Laporan Akhir

Laporan ini di susun dalam enam bab dengan rincian sebagai berikut :

I. Pendahuluan.

Bab ini menguraikan secara singkat latar belakang, berbagai permasalahan, maksud dan tujuan dilakukannya studi, output atau keluaran yang diharapkan, serta sistematika penulisan.

II. Tinjauan Teoritis

Bab ini memuat tinjauan teori yang berkaitan dengan pengembangan sektor industri dan perdagangan, Potensi Sumberdaya Ekonomi, Daya Saing dan Pengembangan Wilayah.

III. Metode Studi

Secara garis besar bab III terdiri dari ruang lingkup pekerjaan, data-data yang dibutuhkan, dan metode analisis data.

IV. Kondisi Wilayah Dan Perekonomian

Bab ini menguraikan kondisi wilayah provinsi Maluku utara meliputi administrasi masing-masing kabupaten/kota, sumberdaya alam, kondisi infrastruktur dan sistem transportasi.

V. Analisis Data Dasar Rancangan Master Plan Pengembangan Perindustrian Dan

Perdagangan

Bab ini mengidentifikasi sektor dan potensi unggulan yang dimiliki oleh tiap kabupaten/kota, menguraikan pola pengembangan sektor perindustrian dan perdagangan dan serta menganalisis pengembangan perdagangan dan kerjasama ekonomi regional.

VI. Rancangan Masterplan Pengembangan Perindustrian Dan Perdagangan

Bab ini menguraikan secara sistematis masterplan perindustrian dan perdagangan yang terdiri atas pengembangan sektor unggulan, sektor pendukung dan strategi pengembangannya. Disamping itu diuraikan juga rencana program dan sasaran serta tujuan yang ingin dicapai.

BAB II TINJAUAN TEORI

A. Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2000).

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Hal itu juga sekaligus menggambarkan balas jasa bagi factor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi *transfer payment*, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke dan dari luar wilayah.

Menurut Rustiadi (2007), pertumbuhan ekonomi wilayah dapat berlangsung jika terjadi hubungan yang saling memperkuat – bukan saling eksploitasi - antara wilayah central dan hinterlandnya. Sehingga akan terbangun keterkaitan yang sinergi, baik *backward and forward linkages*.

B. Teori Basis Ekonomi

Dalam perekonomian regional terdapat kegiatan-kegiatan basis dan kegiatan-kegiatan bukan basis. Menurut Glasson (1990) kegiatan-

kegiatan basis (*basic activities*) adalah kegiatan mengekspor barang-barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau memasarkan barang dan jasa mereka kepada orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan bukan basis (*nonbasic activities*) adalah kegiatan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal didalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan ini tidak mengekspor barang jadi; luas lingkup produksi dan daerah pasar yang terutama bersifat lokal. Implisit didalam pembagian kegiatan- kegiatan ini terdapat hubungan sebab akibat yang membentuk teori basis ekonomi.

Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan kedalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan barang dan jasa sehingga akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan. Sebaliknya berkurangnya kegiatan basis akan mengurangi pendapatan suatu daerah dan turunnnya permintaan terhadap barang dan jasa dan akan menurunkan volume kegiatan (Richardson,1977).

Pada dasarnya kegiatan ekspor adalah semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah karena kegiatan basis. Lapangan kerja dan pendapatan di sektor basis adalah fungsi dari permintaan yang bersifat *exogenous* (tidak tergantung pada kekuatan intern/permintaan lokal).

Semua kegiatan lain yang bukan kegiatan basis termasuk ke dalam kegiatan/sektor *service* atau pelayanan, tetapi untuk tidak menciptakan pengertian yang keliru tentang arti *service* disebut saja sektor nonbasis. Sektor nonbasis (*service*) adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal. Karena sifatnya yang memenuhi kebutuhan lokal, permintaan sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, kenaikannya sejalan dengan

kenaikan pendapatan masyarakat setempat. Dengan demikian sektor ini terikat terhadap kondisi ekonomi setempat dan tidak bias berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah. Atas dasar anggapan di atas, satu-satunya sektor yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan alamiah adalah sektor basis.

Analisis basis dan nonbasis pada umumnya didasarkan atas nilai tambah ataupun lapangan kerja. Misalnya, penggabungan lapangan kerja basis dan lapangan kerja nonbasis merupakan total lapangan kerja yang tersedia untuk wilayah tersebut. Di dalam suatu wilayah dapat dihitung berapa besarnya lapangan kerja nonbasis, dan apabila kedua angka itu dibandingkan, dapat dihitung nilai rasio (*base ratio*) dan kemudian dapat dipakai untuk menghitung nilai pengganda basis (*base multiplier*). Rasio basis adalah perbandingan antara banyaknya lapangan kerja nonbasis yang tersedia untuk setiap satu lapangan kerja basis.

Pendekatan secara tidak langsung mengenai pemisahan antara kegiatan basis dan kegiatan bukan basis dapat menggunakan salah satu ataupun gabungan dari tiga metode yaitu:

- a. Menggunakan asumsi-asumsi atau metode arbeter sederhana

Mengasumsikan bahwa semua industri primer dan manufaktur adalah Basis, dan semua industri jasa adalah bukan basis, metode tidak memperhitungkan adanya kenyataan bahwa dalam sesuatu kelompok industri bisa terdapat industri-industri yang menghasilkan barang yang sebagian diekspor atau dijual kepada lokal atau ke duanya.

- b. Metode *Location Quotient* (LQ).

Metode *Location Quotient* (LQ) adalah salahsatu tehnik pengukuran yang paling terkenal dari model basis ekonomi untuk menentukan sektor basis atau nonbasis (Arsyad, 1999). Analisis LQ dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan

merumuskan komposisi dan pergeseran sektor-sektor basis suatu wilayah dengan menggunakan produk domestik regional bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan wilayah.

c. Metode ketiga, yakni kebutuhan minimum (*minimum requirements*)

Merupakan modifikasi dari metode LQ dengan menggunakan distribusi minimum dari employment yang diperlukan untuk menopang industri regional dan bukannya distribusi rata-rata.

C. Analisis Potensi Relatif Perekonomian Wilayah

- Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*)

Istilah *comparative advantage* (keunggulan komparatif) mula-mula dikemukakan oleh David Ricardo (1817) sewaktu membahas perdagangan antara dua Negara. Dalam teori tersebut, Ricardo membuktikan bahwa apabila ada dua Negara yang saling berdagang dan masing-masing Negara mengkonsentrasikan diri untuk mengeskpor barang yang bagi negara tersebut memiliki keunggulan komparatif maka kedua negara tersebut akan beruntung. Ternyata ide tersebut bukan saja bermanfaat dalam perdagangan internasional tetapi juga sangat penting diperhatikan dalam ekonomi global.

- Keunggulan Kompetitif (*Competitive Advantage*)

Pada saat ini istilah yang sering dipakai adalah *competitive advantage* (keunggulan kompetitif). Keunggulan kompetitif menganalisis kemampuan suatu daerah untuk memasarkan produknya di luar daerah / luar negeri / pasar global. Istilah keunggulan kompetitif lebih mudah dimengerti, yaitu cukup melihat apakah produk yang kita hasilkan bias dijual di pasar global secara menguntungkan. Jadi, kita tidak lagi membandingkan potensi komoditi yang sama di suatu negara terhadap komoditi semua negara pesaingnya di pasar global. Namun demikian,

manfaat analisis keunggulan kompetitif bagi suatu wilayah adalah terbatas karena tidak banyak komoditi yang memenuhi persyaratan tersebut.

Kemampuan memasarkan barang di pasar global sangat terkait dengan tingkat harga yang sedang berlaku di pasar global padahal di sisi lain harga di pasar global selalu berfluktuasi. Dengan demikian, analisis keunggulan kompetitif menjadi tidak langgeng tetapi berdasarkan tingkat harga yang sedang berlaku. Analisis keunggulan komparatif tidak selalu dipengaruhi oleh fluktuasi harga karena menggunakan metode perbandingan. Karena semua pihak terkena fluktuasi harga yang sama maka angka perbandingan tidak berbeda jauh dalam berbagai tingkat harga.

Banyak komoditi yang hanya diproduksi untuk kebutuhan lokal atau ada yang dipasarkan ke wilayah tetangga tetapi pada saat ini belum mampu untuk masuk ke pasar global. Sebaliknya analisis keunggulan komparatif tetap dapat digunakan untuk melihat apakah komoditi itu memiliki prospek untuk dikembangkan walaupun saat ini belum mampu memasuki pasar global. Keunggulan komparatif dapat dijadikan pertanda awal bahwa komoditi itu punya prospek untuk juga memiliki keunggulan kompetitif. Setidaknya komoditi itu layak untuk dikembangkan baik untuk memenuhi kebutuhan lokal maupun untuk pasar tetangga.

D. Daya Saing Wilayah

International Institute of Management Development (IMO) merupakan lembaga pendidikan dan pengembangan manajemen yang berpusat di Swiss, terkenal dengan laporan tahunannya berjudul "*World Competitiveness Yearbook*" menggunakan empat parameter dalam mengukur daya saing, yakni kinerja ekonomi, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, dan infrastruktur. Di lain pihak,

World Competitiveness Forum (WEF), yang didukung oleh dua orang pakar daya saing terkenal, M. E. Porter (ISC-HBS), J.D. Sachs (CIO-HU), terkenal dengan laporan tahunannya "*Growth Competitiveness Report*" menggunakan tiga parameter dalam mengukur daya saing, yaitu indeks makro ekonomi, indeks teknologi dan indeks institusi layanan publik. Di samping itu, Nathan Ass. Inc. dan J.E. Austin Inc. yang bekerjasama dengan USAID dalam lembaga "*The Competitiveness Initiative*" (TCI), terkenal dengan laporan "*TCI-Global Competitiveness Report*" menggunakan tujuh indeks faktor dalam mengukur daya saing, yakni indeks keterbukaan, pemerintahan, keuangan/pembiayaan, infrastruktur, teknologi, manajemen bisnis, dan tenaga kerja.

Menurut Warner (2001), suatu negara memiliki daya saing apabila negara tersebut dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan. Untuk mencapai daya saing yang tinggi diperlukan stabilitas makroekonomi, dan memiliki struktur biaya produksi yang lebih rendah, dengan kata lain mampu menjual produk-produk domestiknya pasar internasional dengan harga yang relatif lebih rendah, selain mengembangkan hal-hal yang dapat membantu proses pertumbuhan ekonomi tersebut. Daya saing yang berbasis pada kawasan geografis, seperti negara atau daerah, berbeda dengan daya saing suatu institusi bisnis (industri, perusahaan, kelompok produk, atau individu produk). Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi mengenai perbedaan keduanya.

Krugman (1997) melakukan kritik terhadap penggunaan istilah *Competitiveness of Nation*, dengan alasan sangat berbahaya karena dapat menyebabkan timbulnya proteksionisme dan kebijakan publik yang buruk. Konsep daya saing daerah atau nasional adalah hampa dibandingkan dengan konsep daya saing perusahaan (industri) di suatu negara atau daerah. Namun demikian,

Menurut Porter (1996) dan Begg (1999), keduanya menyatakan bahwa konsep daya saing juga dapat digunakan pada konteks satuan wilayah nasional atau regional.

Misalnya, konsep daya saing tersebut digunakan untuk menunjukkan keberuntungan ekonomi relatif suatu satuan regional (negara atau daerah) dibandingkan dengan yang lainnya, pada tingkat aktivitas ekonomi dan variasi sumberdaya yang dimiliki masing-masing satuan wilayah tersebut.

Selanjutnya, menurut Siebert (2000), daya saing perusahaan merupakan penyederhanaan dari konsep yang luas dari area geografis. Beliau merumuskan bahwa daya saing tersebut muncul pada sekurang-kurangnya tiga level, yaitu perusahaan, area geografis dan tenaga kerja. Negara atau daerah bersaing menghadapi yang lainnya untuk memobilisasi faktor produksi menuju faktor pasar, sementara perusahaan bersaing untuk memperebutkan pangsa pasar.

Daya saing regional (daerah) adalah kemampuan daerah tersebut untuk membantu perkembangan, menarik pengusaha, serta mendorong kegiatan ekonomi, sehingga masyarakat di daerah tersebut dapat menikmati kemakmuran ekonomi yang baik. Menurut Huovari *et al.* (2001), daya saing regional dapat dibangun dalam suatu lingkungan produksi yang memiliki aksesibilitas tinggi, sehingga menghidupkan dan menarik mobilitas faktor-faktor produksi, dan hasilnya adalah membantu perkembangan ekonomi. Faktor-faktor produksi bergerak tersebut adalah tenaga kerja trampil, wirausahawan yang inovatif, serta *footloose capital*. Keberhasilan menarik faktor-faktor tersebut menciptakan ekonomi eksternal, seperti manfaat lokalisasi dan aglomerasi, yang selanjutnya meningkatkan perkembangan ekonomi daerah.

Menurut Huovari *et al.* (2001), teori pertumbuhan merupakan tahap awal model konseptual daya saing. Pada model pertumbuhan tradisional, produksi

berasal dari gabungan antara faktor tenaga kerja dan kapital fisik, dengan suatu tingkat teknologi tertentu. Kemajuan konsep tersebut dianggap bersifat eksogen (Solow, 1956 dan Swan, 1956). Model baru pertumbuhan (model endogen) menekankan pada *human capital* sebagai faktor "produksi esensial lainnya, ketika proses produksi menjadi lebih sulit, "know-how" merupakan faktor yang lebih penting dan perkembangan teknologi lebih cepat (Aghion dan Howitt, 1998). Daerah-daerah di Indonesia memiliki perbedaan yang nyata dalam hal pasokan sumberdaya fisik, sehingga peranan *human capital* sangat penting untuk mendorong pengembangan produksi yang efisien dan efektif.

Beberapa daerah di Indonesia, seperti Kalimantan Timur dan Irian Jaya yang relatif lebih makmur karena sumberdaya fisik yang digabungkan dengan sumberdaya teknologi dan *human capital* (khususnya untuk industri) membuktikan *human capital* merupakan hal terpenting dalam meningkatkan pertumbuhan. Batam, yang relatif kurang memiliki kemampuan sumberdaya fisik, tetapi mampu menghimpun sumberdaya teknologi dan *human capital*, untuk menggerakkan sumberdaya lainnya, menjadi bukti bahwa *human capital* tetap memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan.

Menurut Huovari *et al.* (2001), faktor kemajuan teknologi merupakan sumber pertumbuhan yang lain. Model pertumbuhan endogen menganggap kemajuan teknologi sebagai faktor endogen, bukan faktor eksogen bagi pertumbuhan. Kemajuan teknologi tersebut ditentukan oleh proses R & D, *learning by doing*, dan proses terkait lainnya. Inovasi yang berkembang merupakan saluran untuk memperoleh teknologi yang lebih baik. Di daerah, R & D yang dilakukan oleh perusahaan, bukan hanya merupakan sarana untuk meningkatkan inovasi dalam perusahaan, tetapi juga menjadi faktor pendorong peningkatan produktivitas dan daya saing produksi daerah tersebut.

Menurut Stern *et al.* (2000) serta Porter dan Stern (1999), pada tingkat regional, inovasi yang tinggi memerlukan kondisi lingkungan, infrastruktur dan kerjasama yang mendukung pada setiap kluster industri. Dengan demikian, menurut Porter (1998), keberadaan sektor lain untuk mendukung inovasi dari suatu sektor adalah sangat penting. *Human capital* dan inovasi pada kawasan ekonomi baru menjadi sumber daya saing regional. Urbanisasi, aglomerasi, lokalisasi, dan manfaat lain menjadi faktor eksternal ekonomis dari suatu saluran utama yang mentransformasi keseimbangan regional dalam suatu negara (Fujita *et al.*, 1999). Manfaat aglomerasi dapat terlihat apabila membandingkan manfaat antara urbanisasi dan lokalisasi. Manfaat urbanisasi terjadi dari keberadaan beberapa pelaku dan sektor dalam suatu kawasan yang sama.

Manfaat lokalisasi mengacu pada kegunaan perusahaan yang mampu memberikan bantuan kepada perusahaan lain dalam suatu sektor industri. Aksesibilitas regional merupakan salah satu pemacu pertumbuhan daerah. Daerah yang memiliki aksesibilitas tinggi lebih cepat berkembang dibanding dengan daerah yang kurang memiliki aksesibilitas. Aksesibilitas tersebut tergantung pada ketersediaan dan mutu infrastruktur perhubungan dan jaraknya menuju pusat pertumbuhan dan pasar.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat empat dimensi yang menentukan daya saing daerah yang saling terkait, yaitu *Human capital*, *Innovativeness*, *Agglomeration*, dan *Accessibility*. *Human capital* merupakan faktor pertumbuhan ekonomi yang sangat krusial pada masyarakat berbasis pengetahuan modern, karena merupakan jantung perilaku inovatif yang menjadi sumber kemajuan teknologi. Dalam pemahaman terhadap daya saing seyogyanya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut (Daryanto, 2003).

1. Cakupan daya saing lebih luas dan tidak sebatas hanya produktivitas dan

Efisiensi.

2. Pelaku ekonomi berada dalam suatu system ekonomi yang bersinergi.
3. Sasaran peningkatan daya saing suatu per:ekonomian adalah bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Hakekat daya saing adalah kompetisi. Oleh karena itu, daya saing tidak akan pernah tercapai pada sistem perekonomian tertutup.

Daya saing wilayah dapat pula dicapai dengan mengembangkan kompetensi inti yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Menurut Daryanto (2003), dalam konteks pengembangan wilayah kompetensi inti merupakan upaya mengkoordinasikan dan mengintegrasikan sektor-sektor berkembang di suatu wilayah tertentu. Semakin baik pengkoordinasian dan pengintegrasian yang dilakukan, maka semakin tinggi pula upaya untuk mengembangkan kompetensi inti, yang berimplikasi pada sulitnya wilayah lain untuk bersaing dengan wilayah yang bersangkutan. Keunggulan bersaing wilayah tercipta apabila wilayah tersebut memiliki kompetensi inti yang dapat dibedakan dengan wilayah lainnya, dan sulit untuk ditiru.

Pengembangan kompetensi inti tersebut menggunakan strategi fokus. Kompetensi inti dapat diperoleh melalui upaya penciptaan atau aksesibilitas terhadap faktor produksi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya. Menurut Board (1993), kawasan yang telah mencapai tahapan kompetensi inti memiliki empat atribut sebagai berikut.

1. Kemampuan wilayah tersebut untuk memberikan akses pada variasi pasar yang luas.
2. Kemampuan wilayah tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap persepsi pelanggan atas manfaat yang diperoleh dari barang dan jasa yang ditawarkan oleh wilayah tersebut.

3. Kemampuan wilayah tersebut menghasilkan barang dan jasa unggulan yang sulit ditiru, akan menciptakan hambatan masuk bagi kawasan lain untuk memberikan layanan serupa.
4. Kemampuan untuk melakukan koordinasi yang kompleks dari beragam teknologi dan keahlian terapan.

Menurut Daryanto (2003), kata kunci pada kompetensi inti adalah *market intelligence*. Suatu wilayah dapat bersaing secara global, apabila pengambil keputusan dan kebijakan, serta dunia usaha dapat mengkaji bagaimana suatu kompetensi inti dan peluang ekonomi suatu wilayah dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar, baik pasar lokal, nasional, maupun pasar global. Untuk mengakses informasi 'kebutuhan pasar tersebut diperlukan *market intelligence* yang mampu memandang ke depan tentang pasar, serta mampu mengantisipasi kecenderungan konsumsi dan ekspor. *Market intelligence* juga harus mampu menganalisa perubahan pasar dan perkembangan kompetensi inti itu sendiri, agar permintaan terhadap barang dan jasa pada masa yang akan datang dapat dipenuhi.

Dengan pemberian otonomi yang besar kepada daerah, pada masa yang akan datang keberhasilan pengembangan wilayah atau daerah sangat tergantung pada kebijakan pemerintah daerah yang bersangkutan, terutama dalam menyikapi perubahan-perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah seyogyanya mampu merumuskan dan mengimplementasikan visi engembangan wilayahnya masing-masing, sesuai dengan nilai-nilai (*value*), arah (*mission*), dan tujuan (*goal*), yang akan mengarahkan masa depan wilayah/daerah yang bersangkutan. Menurut Porter (1990), penguatan spesialisasi unit-unit kecil wilayah otonom dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yakni inovasi dan pembaharuan.

Strategi pengembangan yang didasarkan pada tenaga kerja yang murah serta besaran skala ekonomi tertentu merupakan paradigma yang sudah usang. Menurut Daryanto (2003), penguatan kapasitas pada tingkat lokal dapat dicapai dengan memaksimalkan keunggulan lokal, dan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut merupakan pelaku kunci dalam merangkai komponen-komponen kunci pembentuk daya saing wilayah. Dalam rangka penguatan kapasitas lokal, pada saat berbagai agen-agen pembangunan, baik di Eropa maupun di Amerika Serikat, sibuk memfasilitasi pengembangan klaster industri, dimana setiap klaster menspesialisasikan pengembangan pada keunggulan yang melekat pada komunitas lokalnya.

Profesor Michael E. Porter, dari Harvard Business School-Harvard University, merupakan pemikir terdepan yang mengembangkan konsep klaster industri. Alasannya bahwa keberhasilan ekonomi lokal dan regional sangat tergantung pada investasi yang inovatif, perusahaan-perusahaan yang memiliki daya saing internasional, dan juga dukungan infrastruktur sosial dan ekonomi yang handal. Konsep klaster industri merupakan dimensi spasial yang lebih luas, dan bukan hanya pengembangan properti semata. Dorienger dan Terkla (1995), mendefinisikan klaster industri sebagai "Pemusatan industri-industri secara geografis untuk memperoleh keunggulan kinerja melalui *co-location*". Definisi tersebut serupa dengan ekonomi aglomerasi, dimana dalam klaster industri yang diamati adalah aglomerasi ekonomi di dalam klaster industri.

E. Pembangunan Daerah

Adanya perbedaan-perbedaan di antara sifat-sifat dari perekonomian daerah dengan perekonomian nasional dan di antara kekuasaan Pemerintah Daerah dengan

Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembangunan akan menimbulkan pengaruh yang berbeda pula terhadap corak strategi program pembangunan daerah.

Tujuan pembangunan, termasuk pembangunan daerah, merupakan suatu kehendak masyarakat untuk mencapai suatu keadaan tertentu atau menghindari terjadinya keadaan tertentu di masa yang akan datang. Oleh sebab itu faktor yang mempengaruhi corak pembangunan daerah dan sumber-sumber daya yang tersedia – yang merupakan faktor-faktor yang benar-benar timbul di dalam masyarakat -, faktor ini merupakan keadaan yang ingin diciptakan oleh masyarakat pada masa yang akan datang (Soekirno, 1976).

Dengan merumuskan tujuan-tujuan pembangunan, atau dalam bentuk yang lebih terperinci adalah menentukan *target* yang ingin dicapai dalam pembangunan, sesuatu masyarakat telah lebih menegaskan lagi bentuk keadaan sosial dan ekonomi yang ingin diciptakannya pada beberapa tahun mendatang. Dengan mengumpulkan fakta-fakta mengenai masalah-masalah pembangunan daerah yang ada (wujud) di dalam masyarakat, sebenarnya masyarakat tersebut telah dapat merumuskan langkah-langkah yang harus dibuat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Pembangunan Daerah merupakan semua kegiatan pembangunan baik yang termasuk maupun tidak termasuk urusan rumah tangga daerah yang meliputi berbagai sumber pembiayaan, baik yang berasal dari Pemerintah (APBD dan APBN) dan bersumber dari masyarakat. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah di biyai oleh: (a) Pemerintah Pusat sebagai pelaksana asas dekonsentrasi; (b) Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas perbantuan. Sedangkan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat termasuk: (a) Badan Usaha Milik Negara, (b) Badan Usaha Milik Daerah dan kegiatan masyarakat lainnya.

Dalam usaha pembangunan, pemerintah pada umumnya hanyalah menyediakan prasarana untuk memperlancar kegiatan perekonomian dan selanjutnya menyerahkan kepada pihak swasta untuk mengembangkan sektor ekonomi yang modern. Disamping itu pemerintah daerah perlu juga untuk secara aktif mengadakan perencanaan atau program pembangunan daerahnya dengan adanya pelaksanaan asas desentralisasi.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut Pemerintah Daerah perlu merumuskan kebijakan yang kemudian dituangkan dalam bentuk program maupun proyek. Dari berbagai program maupun proyek yang telah dilakukan dapat dipelajari berbagai kelemahan maupun kelebihan yang akan sangat berguna bagi proses perencanaan pembangunan daerah selanjutnya. Oleh karena itu pada bagian ini akan dikaji beberapa pendekatan yang diarahkan untuk pengembangan daerah di masa lalu. Kajian dan tinjauan ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan pengetahuan yang memadai bagi penyusunan *Master Plan* pengembangan Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Maluku Utara.

F. Pendekatan Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat merupakan suatu proses, metode, program, kelembagaan dan gerakan yang mengikutsertakan masyarakat sebagai basis dalam menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi bersama, mendidik dan melatih masyarakat dalam proses demokrasi untuk mengatasi masalah secara bersama dan mengaktifkan kelembagaan atau menyediakan fasilitas untuk alih teknologi kepada masyarakat. Konsep dan pendekatan ini mulai diperkenalkan oleh Inggris pada tahun 1948 di koloninya di Benua Afrika dalam upaya memerdekakan koloni tersebut. Pendekatan ini mulai dilaksanakan di India pada tahun 1952 oleh

Pemerintah Amerika Serikat dengan bantuan Ford Foundation dan dilanjutkan ke negara-negara Filipina, Indonesia, Iran dan Pakistan.

Konsep dan pendekatan ini mulai tergeser ketika dimulainya “Revolusi Hijau” pada tahun 1960-an dan menjelang tahun 1970-an berubah atau diganti dengan konsep dan pendekatan pembangunan pedesaan terpadu “*Integrated Rural Development*”. Kemunduran perhatian terhadap Pengembangan Masyarakat pada tahun 1960-an ini terutama disebabkan oleh pandangan-pandangan politik dari pimpinan negara yang berbeda dan berkurangnya dana bantuan dari negara donor terhadap pengembangan masyarakat. Walaupun demikian, konsep dan pendekatan pengembangan masyarakat ini menjadi dasar bagi pengembangan konsep dan pendekatan pembangunan pedesaan terpadu.

G. Pembangunan Partisipatif

Untuk kurun waktu yang panjang, pembangunan ekonomi desadilaksanakan atas dasar kepentingan supra desa (atas desa). Pengambilan keputusan mengenai strategi pembangunan, perencanaan serta pelaksanaan didominasi oleh negara serta pelaku-pelaku ekonomi besar supra desa. Strategi pembangunan ekonomi desa bias supra-desa ini secara umum dicirikan oleh tekanan berlebihan terhadap aspek ekonomi supra desa, dan sebaliknya menelantarkan aspek ekonomi desa serta aspek sosial dan budaya. Di dalam kerangka pembangunan seperti ini tujuan dan target pembangunan ditentukan sesuai agenda pembangunan nasional. Sebaliknya kebutuhan atau kepentingan lokal terdesak ke belakang.

Banyaknya kegagalan dan pemborosan dari pendekatan pembangunan ekonomi pedesaan melalui pendekatan terpusat menimbulkan kesadaran akan perlunya pendekatan yang lebih berorientasi pada aspek-aspek ekonomi lokal serta aspek-aspek sosio budaya lokal, terutama untuk program pembangunan pedesaan

yang umumnya berskala menengah dan kecil, padat dengan kepentingan lokal serta memerlukan adaptasi pada kondisi spesifik lokal. Pendekatan pembangunan desa yang mengambil sudut pandang kepentingan lokal dengan sendirinya mengimplikasikan suatu pendekatan pembangunan partisipatif.

Menurut Cohen dan Uphoff (1977), pengertian partisipasi didefinisikan secara substansial ke dalam empat aspek yang disebut Partisipasi dalam Pembangunan (*Development Participation*):

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
3. Partisipasi dalam berbagi keuntungan program
4. Partisipasi dalam mengevaluasi program.

Terdapat keterkaitan yang erat antara partisipasi di satu aspek dengan derajat partisipasi pada aspek lain dari program pembangunan. Tahap pengambilan keputusan menentukan derajat partisipasi pada tahap implementasi dan pola distribusi keuntungan dari program serta kemungkinan adanya kesempatan dalam evaluasi program. Sebaliknya penilaian terhadap skala keuntungan dan pola distribusi keuntungan program dapat menjadi masukan dalam sistem pengambilan keputusan dan sistem implementasi.

Dalam pendekatan partisipatif harus dipertimbangkan *Siapa* atau *Golongan* mana saja yang partisipasinya mutlak diperlukan bila program ingin sukses. Masalah ini berkaitan dengan kenyataan bahwa masyarakat umumnya sangat heterogen. Dimensi lain yang harus diperhatikan adalah *Bagaimana* dari partisipasi. Pada segi ini yang harus diperhatikan adalah: a) sumber dari proses partisipasi; pencetus partisipasi apakah dari atas atau bawah, insentif bagi partisipasi (derajat kesukarelaan atau derajat tekanan); b) bentuk partisipasi; pola organisasi (apakah partisipasi oleh individu atau melalui grup, partisipasi langsung atau tidak

langsung; c) cakupan partisipasi (jangka waktu partisipasi dan jumlah serta cakupan kegiatan); d) efektivitas dari proses partisipasi yakni terkait dengan pemberdayaan (partisipasi hanya untuk memberi usulan atau turut menentukan).

H. Pendekatan Pembukaan Daerah Baru dan Migrasi Penduduk

Konsep ini terutama diterapkan di negara-negara yang memiliki penyebaran penduduk tidak merata dan memiliki sumberdaya alam yang tidak dimanfaatkan. Pada masa awal pembangunan pedesaan konsep dan pendekatan ini merupakan strategi utama seperti di Brazil, Malaysia dengan FELDA-nya dan Indonesia dengan program transmigrasinya. Program ini kurang mendapat dukungan dan perhatian yang luas dan tidak dapat bertahan lama karena disamping sangat mahal, program tersebut juga kurang memberikan hasil yang memuaskan.

I. Pendekatan Pembangunan Pertanian

Bagi negara-negara sedang berkembang, yang sumberdayanya terbatas untuk pembukaan pemukiman dan lahan pertanian baru dan atau selalu mengalami kekurangan pangan, konsep dan pendekatan yang dianut dan dilaksanakan adalah strategi pembangunan pertanian padat karya untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat dalam penyediaan bahan baku dalam negeri dan meningkatkan ekspor hasil pertanian untuk penerimaan devisa negara. Walaupun strategi ini berhasil meningkatkan produksi dan produktivitas pedesaan tetapi muncul masalah polarisasi factor produksi, masalah kelembagaan dan sebagainya yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara keseluruhan tidak menunjukkan kinerja seperti yang diharapkan.

Revolusi hijau tidak cukup efektif dalam mengurangi tingkat urbanisasi dan dampak negatifnya bagi perkotaan, kurang mampu menjangkau petani kecil dan buruh tani dan terjadinya wilayah terbelakang. Konsep dan pemikiran pembangunan pertanian ini kemudian berkembang menjadi beberapa strategi

seperti diversifikasi ekonomi pedesaan, retribusi lahan dan sumberdaya yang lebih adil dan merata; penyediaan sarana dan fasilitas dasar dan pendukung; program *landreform* dan penyediaan fasilitas sosial dasar bagi masyarakat kecil.

J. Industrialisasi Pedesaan

Beberapa negara mengembangkan program industrialisasi pedesaan melalui promosi industri rumahtangga dan industri kecil serta desentralisasi pengembangan industri. Strategi ini pun tidak berkembang seperti yang diharapkan. Pertumbuhan kota metropolitan dan kota-kota menengah lainnya menyerap semua kegiatan diatas disamping ketidakmampuan sektor industri kecil itu sendiri untuk bersaing dan terorganisasikan. Karena tidak adanya kaitan yang jelas dan nyata diantara industri kecil dan industri besar, maka manfaat bagi kedua belah pihak hampir tidak ada karena mereka bersaing dalam hal produksi, teknologi, pemasaran dan sebagainya.

K. Pembangunan Desa Terpadu

Dewasa ini pembangunan desa terpadu merupakan pendekatan yang relatif lebih komprehensif dan telah menarik perhatian dalam rangka pembangunan ekonomi negara-negara sedang berkembang. Strategi ini bertujuan untuk peningkatan produktivitas, meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan swadaya masyarakat dan pembangunan secara mandiri. Unsur-unsur pokok dalam program pembangunan desa terpadu adalah: pembangunan pertanian yang padat karya, menciptakan kesempatan kerja melalui pekerjaan umum skala kecil, pengembangan industri kecil yang padat karya di kawasan pedesaan, swadaya masyarakat secara lokal dan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pengembangan hirarki perkotaan yang menunjang pembangunan pedesaan, dan pengembangan tatanan kelembagaan yang memadai untuk koordinasi proyek-proyek multi sektor dan lintas sektor.

L. Pengembangan Ekonomi Pedesaan dan Pembangunan Wilayah

Pembangunan ekonomi pedesaan secara umum memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam hal pemerataan hasil pembangunan dan pendapatan penduduk, pengentasan kemiskinan, pencapaian ketahanan pangan baik di tingkat lokal maupun di tingkat rumah tangga dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Untuk perencanaan wilayah terutama wilayah lokal dengan luas yang relatif kecil dalam rangka pembangunan desa haruslah dipahami benar-benar bahwa masalah yang dihadapi begitu kompleks dan luas. Sehubungan dengan itu terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- (1) Terdapat tiga sistem utama terbuka yang harus diperhatikan yakni:
 - (a) Sistem tata ruang termasuk lokasi perusahaan produksi, permukiman, prasarana fisik dan pola tata guna tanah
 - (b) Sistem ekonomi yaitu termasuk pola produksi, investasi, arus produksi dan barang, harga, tataniaga dan kelembagaannya; dan
 - (c) Sistem sosial yaitu termasuk pelayanan sosial, kesempatan kerja, keamanan dan ketentraman, organisasi sosial dan lembaga-lembaga pembangunan.
- (2) Perencanaan lokal perlu dihubungkan dan dikoordinasikan dengan rencanarencana regional dan nasional dalam berbagai sektor.
- (3) Adanya kebutuhan untuk menyusun suatu rencana antar sektoral dan antar proyek dan menciptakan hubungan antar system diantara kegiatan-kegiatan tersebut di tingkat lokal.
- (4) Dinamika hubungan antara perencanaan dan pelaksanaan harus tetap dijaga melalui sistem monitoring dan evaluasi.

Perencanaan wilayah lokal untuk pembangunan desa terpadu, mempunyai konsep, prinsip dan strategi tersendiri tergantung pada situasi dan kondisi negara yang bersangkutan. Namun dalam pendekatan secara umum berlaku prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (1) Selektif yang bermakna prioritas dalam kegiatan pembangunan;
- (2) Reduktif yang bermakna menyederhanakan hal-hal yang kompleks terutama di bidang teknologi.
- (3) Konsentratif yang bermakna mengkonsentrasi secara mendalam terhadap aspek selektif dari pembangunan.

M. Pendekatan Pembangunan Ekonomi Lokal

Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL) adalah suatu proses pembangunan yang dilaksanakan di tingkat lokal untuk kepentingan masyarakat lokal dan dilakukan terutama oleh anggota masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan ekonomi lokal mencakup formulasi institusi (baru) dalam menangani pembangunan, peningkatan kapasitas kesempatan kerja lokal untuk menghasilkan produk yang lebih baik, melakukan identifikasi pasar baru, transfer pengetahuan dan mengembangkan lembaga usaha baru.

PEL dan perancangannya akan ditentukan oleh berbagai faktor yaitu sumberdaya alam setempat, tenaga kerja, modal investasi, kewirausahaan, sarana transpot, sarana komunikasi, komposisi industri dan kegiatan ekonomi lainnya, ketersediaan dan aksesibilitas teknologi, skala usaha, pasar ekspor (luar daerah atau luar negeri), kondisi ekonomi eksternal (termasuk ekonomi internasional), kapasitas pemerintah lokal, besarnya belanja pemerintah, dan berbagai pendukung pembangunan. Faktor-faktor tersebut dapat dipadukan dalam empat komponen dan konsep pengembangannya:

- (1) Komponen kesempatan kerja, yang dikembangkan melalui pembangunan aktivitas ekonomi yang mampu menyediakan pekerjaan berkualitas yang sesuai dengan kondisi tenaga kerja yang tersedia di tingkat lokal.
- (2) Komponen basis pembangunan, yang menekankan pada pengembangan kelembagaan ekonomi produktif yang baru dan berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang menekankan pada pembangunan sektor-sektor ekonomi.
- (3) Komponen aset lokasi yang dikembangkan dengan konsep keunggulan kompetitif berbasis pada lingkungan yang berkualitas daripada mengandalkan pada keunggulan komparatif berdasarkan kondisi fisik wilayah.
- (4) Komponen sumberdaya pengetahuan yang dianggap sebagai generator kegiatan ekonomi dan mendapat perhatian lebih besar dari pada hanya sekedar ketersediaan kesempatan kerja.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka PEL dilaksanakan dalam suatu strategi terpadu untuk : (a) membangun kesempatan kerja berkualitas bagi penduduk lokal; (b) mencapai stabilitas ekonomi lokal terutama dengan mengembangkan kemampuan masyarakat lokal untuk secara mandiri memenuhi kebutuhan bagi pengembangan usahanya; dan (c) membangun basis kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam. Hal tersebut dapat terwujud jika dalam pembangunan ekonomi lokal dapat dipadukan empat bentuk strategi dasar di bawah ini :

- (1) Strategi Pembangunan Lokalita yaitu pembangunan atau meningkatkan mutu berbagai perangkat infrastruktur lokal yang sedemikian sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan usaha (melalui perhitungan biayanya) untuk mengembangkan kegiatan pada wilayah atau kegiatan ekonomi tertentu yang diinginkan atau dibutuhkan oleh masyarakat lokal.

- (2) Strategi Pembangunan Usaha, yaitu dengan memberikan dorongan bagi perkembangan kegiatan usaha/bisnis tertentu yang dibutuhkan dan diinginkan seperti melalui pelayanan usaha kepada bisnis kecil, penyediaan dan aksesibilitas teknologi, pengembangan lembaga pembiayaan dalam bentuk modal ventura dan penyediaan informasi bisnis.
- (3) Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia, yaitu dengan mendekatkan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja terutama dalam hal keterampilan dan keahlian seperti melalui pelatihan yang spesifik, penempatan tenaga terarah dan program kesempatan kerja lokal.
- (4) Strategi Pengembangan Kesempatan Kerja Berbasis Masyarakat yaitu mempromosikan pengembangan kegiatan ekonomi di tingkat masyarakat pemukiman/rukun tetangga melalui pengembangan kegiatan organisasi masyarakat dan koperasi.

Berbagai model dan pendekatan pembangunan daerah, seperti telah diuraikan secara ringkas di atas, pada dasarnya memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Pada dasarnya ada tiga kategori kelemahan yang tampak sebagai berikut:

- (a) Parsialitas
- (b) Dikotomistik
- (c) Tidak memberi arah tentang membangun daya saing ekonomi daerah

Parsialitas tercermin dari model atau pendekatan pembangunan yang hanya mementingkan satu atau beberapa aspek tertentu dalam pembangunan. Seperti pengembangan masyarakat dan pembangunan partisipatif hanya menekankan pada pentingnya peranan masyarakat dan mengabaikan peranan infrastruktur dan teknologi serta keterkaitan antar aspek pembangunan.

Dilain pihak sifat dikotomistik muncul pada saat pembangunan daerah dipilah-pilah antara desa-kota, usaha kecil-usaha besar, penguasa-rakyat maupun pertanian-non pertanian. Pendekatan pembangunan yang hanya menekankan pada satu pihak saja tentunya tidak akan menghasilkan pertumbuhan, pemerataan dan kelestarian lingkungan yang optimal. Model atau pendekatan pembangunan pertanian, industrialisasi pedesaan dan pembangunan ekonomi lokal merupakan contoh dikotomistik ini.

Kelemahan yang menonjol dari berbagai model pembangunan di atas adalah tidak adanya arahan yang konkrit dan rinci tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana membangun daya saing ekonomi daerah. Model pembangunan desa terpadu mungkin merupakan model atau pendekatan yang relatif sudah mulai memberikan gambaran yang jelas bagi peningkatan daya saing pedesaan

BAB III METODE STUDI

A. Ruang Lingkup Pekerjaan

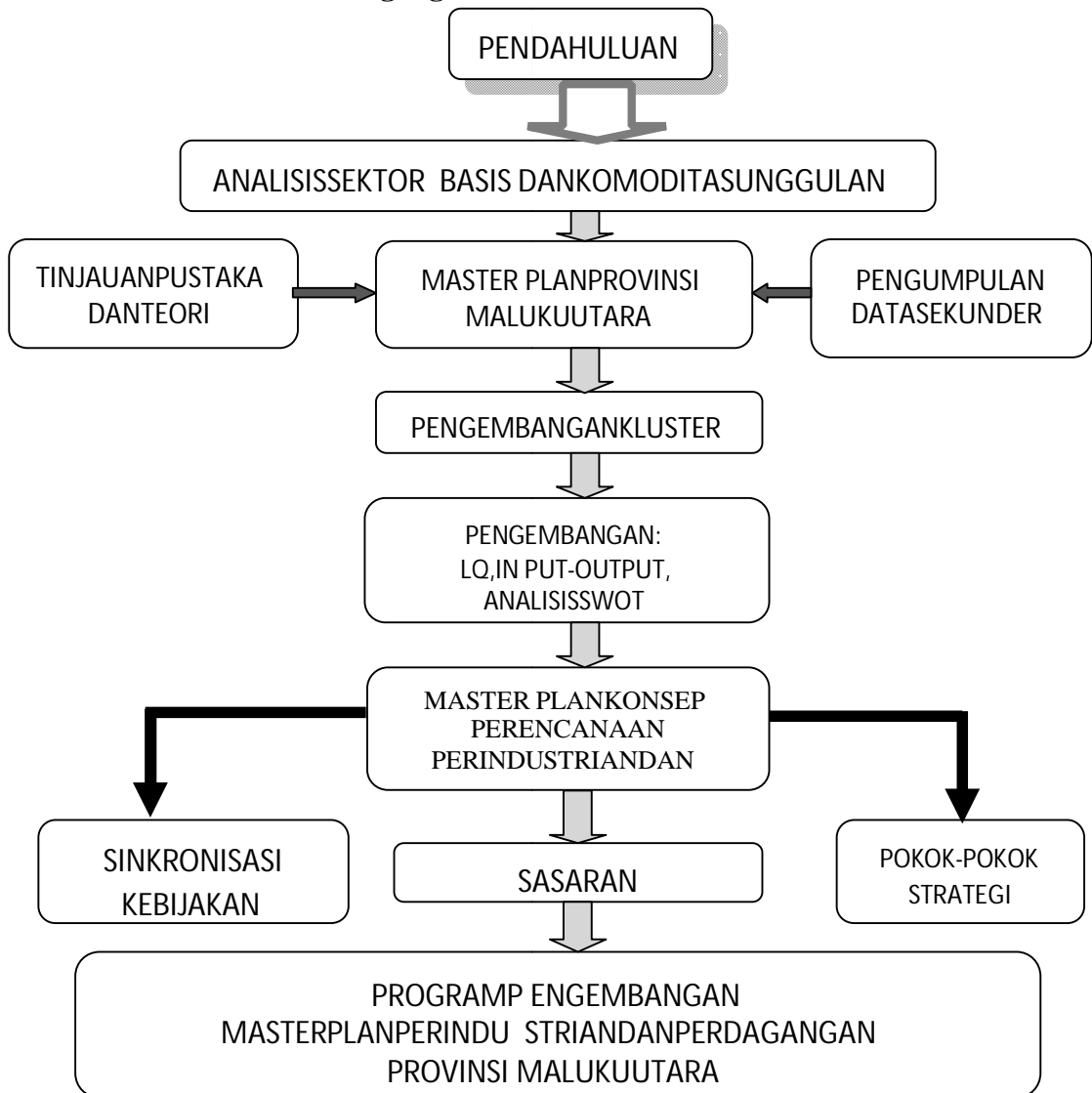
Sebagai langkah awal dalam menyusun master plan pengembangan perindustrian dan perdagangan provinsi Maluku Utara adalah dengan menyusun profile dan struktur ekonomi regional dengan fokus analisis pengembangan potensi ekonomi daerah berupa struktur kegiatan usaha, sumberdaya manusia dan sarana prasarana infrastruktur.

Atas dasar tersebut, maka ruang lingkup pekerjaan penyusunan masterplan pengembangan perindustrian dan perdagangan prov. Maluku Utara sebagai berikut :

1. Melakukan analisa struktur perekonomian daerah provinsi Maluku Utara baik secara sektoral maupun spasial dengan menitikberatkan pada potensi unggulan yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
2. Melakukan analisa cluster terhadap sektor-sektor perindustrian dan perdagangan kabupaten/kota.
3. Menetapkan rancangan Rencana Tindak (Action Plan) sebagai dasar kegiatan implementasi pengembangan perindustrian dan perdagangan provinsi Maluku Utara.
4. Membuat rekomendasi berdasarkan dengan sinkronisasi kebijakan dan pokok-pokok strategi dalam pengembangan perindustrian dan perdagangan.

Gambar 1.3. Sistematika Penulisan Penyusunan Masterplan Pengembangan

Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara



B. Data Yang Dibutuhkan

Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui survey, dokumentasi, questioner dan wawancara. Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan inventarisasi sedangkan data primer dilakukan melalui survey, wawancara langsung dan kuosioner.

Sumber data primer meliputi :

- a. Survey potensi sumber daya secara langsung
- b. Masyarakat dalam hal ini tokoh masyarakat yang mengetahui secara langsung berkaitan dengan topik penelitian terutama dalam hal pengembangan investasi.
- c. Pejabat pemerintah daerah sesuai dalam hal kebijakan dan dukungan terhadap rencana pengembangan investasi.
- d. Organisasi dan lembaga perindustrian dan perdagangan
- e. Kalangan swasta dan dunia usaha yang maju dan mendukung implementasi pengembangan investasi.

Sedangkan data-data sekunder meliputi :

- a. Provinsi dan kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara dalam angka
- b. Kecamatan dalam angka
- c. RDTR dan RTRW Provinsi Maluku Utara
- d. RDTR dan RTRW Kabupaten/Kota

Data-data tersebut diperoleh dari :

- a. BPS Provinsi dan Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara
- b. BAPPEDA Provinsi dan Kabupaten/Kota provinsi Maluku Utara
- c. Organisasi dan Kelembagaan Perindustrian dan Perdagangan di wilayah provinsi Maluku Utara
- d. BKPMMD Provinsi dan Kabupaten
- e. Kelembagaan dan dinas lain yang terkait.

C. Metode Analisis Data

- a. Metode Penentuan Basis Ekonomi Wilayah

Pada studi ini indikator identifikasi sektor basis dan non-basis didekati dengan metode *location quotient*. Metode ini pada dasarnya menghitung pangsa relatif pendapatan (tenaga kerja) suatu sektor pada tingkat wilayah kabupaten

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, H and Jim Taylor, 1993. *Regional Economics and Policy*, 2nd Edition.
London: Harvester Wheatsheaf.
- Arsyad, Lincolin, 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Amin, Chairullah. 2012. *Sektor Unggulan dan Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara*. Ternate.
- BPS Provinsi Maluku Utara. *Maluku Utara Dalam Angka, 2000-2012*. Ternate.
- Daryanto, A. 2003. Teknik Pengkajian Sumberdaya Dalam Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal dan Regional. Makalah Diklat Manajemen Pembangun Ekonomi dan Usaha Daerah, Jakarta, 28 April – 3 Mei 2003.
- Fujita, M., P. Krugman, dan A.J. Venables. 1999. *Spatial Economy*. MIT Press, Cambridge. Massachusetts.
- Glasson, John. 1990. *Pengenalan Perancangan Wilayah, Konsep dan Amalan* (Alih Bahasa Ahris Yakup). Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia Kualalumpur.
- Houvari, J. et al. 2001. *Constructing Index for Regional Competitiveness*. National Technology Agency, TEKES, Finland. Helsinki.
- Jhingan, M.L, 1999. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (terjemahan), Edisi Ketujuh, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Krugman, P. 1997. *Pop Internationalism*. MIT Press. Cambridge. Massachusetts.
- Kuncoro, Mudrajad, 2001. *Analisa Spasial dan Regional*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN

- Kuncoro, Mudrajad, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah (Reformasi Perencanaan Strategi dan Peluang)*, Jakarta: Penerbit Airlangga.
- Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.
- Porter, M.E. 1996. *Competitive Advantage, Agglomeration Economies and Regional Policy*. *International Regional Science Review*, 19, 85-90.
- Richardson Harry.,W. (1977). *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*. (terjemahan: Paul Sitohang). LPFE-UI. Jakarta.
- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Maluku Utara.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Maluku Utara.
- Solow, R. 1956. *Investment and Technical Change : Mathematical Methods in the Social Sciences*, Palo Alto, Stanford University Press.
- Stern, S. M.E. Porter, dan J.L. Furman. 2000. *The Determinants of National Innovative Capacity*. NBER Working Paper 7876.
- Swan, T. 1956. *Economic Growth and Capital Accumulation*, *Economic Record*, 32.

